

**LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
17. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/554/KEP/23/2019 Tentang Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

#### **Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang**

- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
  - 3.1.1. Pendapatan
  - 3.1.2. Beban
  - 3.1.3. Belanja
  - 3.1.4. Perubahan Ekuitas

3.1.5. Aset

3.1.6. Kewajiban

3.1.7. Ekuitas Dana

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bab V Penutup

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari:

<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
Pajak Daerah	0
Retribusi Daerah	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0
Lain-lain PAD yang Sah	0

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 tercapai sebesar Rp.,0-. Capaian target pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang per 31 Desember 2019 dihadapkan pada target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi	%
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
	Pajak Daerah	0	0	
	Retribusi Daerah	0	0	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0	0	
	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten per 31 Desember 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
	Belanja Pegawai	2.162.935.000,-	1.999.016.900,-	92,42%	163.918.100,-
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
	Belanja Pegawai	479.291.000,-	455.105.000,-	94,95%	24.186.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	2.616.251.245,-	2.356.138.801,-	90,05%	260.112.444,-
	Belanja Modal	4.019.590.000,-	3.399.933.015,-	84,58%	619.656.985,-
	<b>Jumlah</b>	<b>9.278.067.245,-</b>	<b>8.210.193.716,-</b>	<b>88,49%</b>	<b>1.067.875.529,-</b>

### 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target/realisasi yang telah ditetapkan tidak tercapai seratus persen disebabkan karena :

1. Untuk TPP karena adanya potongan TPP untuk pegawai yang tidak masuk kerja.
2. Untuk penerimaan honor karena adanya rangkap jabatan dalam tim dan adanya anggota tim yang sedang diklat sehingga tidak masuk selama 15 hari kerja atau 20 hari kalender. Untuk uang saku karena menyesuaikan kehadiran peserta rapat.
3. Untuk kegiatan KUA PPAS karena untuk tahun 2019 belum ditetapkan.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**

**Penjelasan Pos- Pos Laporan Realiasi Anggaran SKPD**

**3.1.1. Pendapatan**

Nihil

**3.1.2. Belanja**

Belanja Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 9.278.067.245,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.210.193.716 yang terdiri dari :

**a. Belanja operasi**

**Rp. 4.810.260.701,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian:

<b>No</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Pegawai	2.166.436.000,-	2.002.356.900,-	92,42
2	Belanja Barang	3.092.041.245-	2.807.903.801,-	90,81
	<b>Jumlah</b>	<b>5.258.477.245,-</b>	<b>4.810.260.701,-</b>	<b>91,61</b>

**a.1. Belanja pegawai****Rp 2.002.356.900,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian:

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.726.065.000,-	1.617.412.600,-	93,71	1.659.865.139,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	436.870.000,-	381.604.300,-	87,35	421.164.800,-
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	0		
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	0		
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0		
6	Belanja Uang Lembur	3.501.000,-	3.340.000,-	95,40	7.002.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>2.166.436.000,-</b>	<b>2.002.356.900,-</b>	<b>92,43</b>	<b>2.088.031.939,-</b>

**a.2. Belanja barang dan jasa****Rp 2.807.903.801,-**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.807.903.801,- digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang. Mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, penjiilidan, sewa gedung, jasa konsultasi, makan dan minum, perjalanan dinas.

**a.3. Belanja Hibah****Rp ,00**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. ,00

**a.4. Belanja Bantuan Sosial****Rp. ,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja bantuan sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

**b. Belanja modal****Rp 3.399.933.015,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.400.000,-	29.582.910,-	97,31
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.989.190.000,-	3.370.350.105,-	84,48
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.019.590.000,-</b>	<b>3.399.933.015,-</b>	<b>84,58</b>

**Penjelasan Pos- Pos laporan Operasional****3.2. 1. Pendapatan- LO****Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2019(Rp)
1	Pajak Daerah	-
2	Retribusi Daerah	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>

**3.2.2 Beban – LO**

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2019 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 2.002.356.900,00 Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai

beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2019

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Beban persediaan tahun 2019 sebesar Rp. 436.093.247,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 317.224.730,00 atau dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar Rp. 118.868.517,00 atau 72,74%.

c. Beban jasa

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi. Beban jasa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.754.839.735,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.042.423.094,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 712.416.641,00 atau 59,40%.

d. Beban pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi. Beban pemeliharaan tahun 2019 Rp. 155.013.101,00 dan 2018 sebesar Rp. 186.882.049,00 dengan kata lain beban pemeliharaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 31.868.948,00

e. Beban perjalanan dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi. Beban perjalanan dinas tahun 2019 sebesar Rp. 465.988.722,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 455.880.129,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.108.593,00

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.160.399.421,23

g. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00.

h. Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00.

i. Beban Lain-lain

Beban tersebut adalah Beban Lain-lain periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00,-

j. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka merupakan Beban Dibayar di Muka periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00

### 1. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Surplus/Defisit	Realisasi 2019
Surplus/Defisit	(5.974.691.126,23)

### 2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2019 sebesar Rp 0,00

### 3. Pos Luar Biasa

Pos luar Biasa pada tahun 2019 sebesar Rp. 0,00.

### 4. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp. (5.974.691.126,23)

## Penjelasan Pos- Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### 3.3.1. Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 4.990.025.334,35 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2018 setelah dilakukan restatement. Ekuitas akhir restatement muncul setelah dilakukan penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai Pendapatan Dibayar di Muka, penambahan nilai Utang Belanja. Surplus/defisit sebesar Rp. (5.974.691.126,23) yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Dari nilai Ekuitas awal ditambah dengan nilai Surplus/Defisit LO kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 6.145.125.276,12

## Penjelasan pos-pos neraca SKPD

### 3.4.1. Aset

Aset SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2019 terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya.

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>a. Aset Lancar</b>	<b>Rp. 2.145.673,00</b>	<b>Rp. 5.838.015,00</b>

Aset Lancar meliputi Kas , Piutang dan Persediaan.

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>a.1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 0,00 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 0,00.

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>a.2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran tahun 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian hutang pajak yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>a.3. Piutang/Tagihan Kepada Pihak ke Tiga</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

merupakan Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
Piutang Pajak	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Piutang Retribusi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Piutang Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>a.4. Persediaan</b>	<b>Rp. 2.145.673,00</b>	<b>Rp. 5.838.015,00</b>

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 2.145.673,00 dan Rp. 5.838.015,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2019	Tahun 2018
ATK	1.596.555	2.642.215
Cetakan	446.500	2.236.000
Alat Kebersihan	102.618	652.800
Alat Listrik	0	307.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.145.673</b>	<b>Rp 5.838.015</b>

	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>b. Aset Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten menerapkan penyusutan barang milik daerah, untuk memperoleh data perbandingan pelaksanaan penyusutan pada Tahun 2019, **maka aset tetap per 31 Desember 2019 yang digunakan sebagai dasar penyusunan *restatement* penyusutan**, dengan hasil sebagai berikut:

Aset tetap:	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Tanah	145.725.000,00	145.725.000,00
Peralatan dan Mesin	1.434.650.239,00	1.253.317.329,00
Akumulasi Penyusutan	1.195.201.897,38	909.471.688,29
Nilai Buku	239.448.341,62	343.845.640,71
Gedung dan Bangunan	1.768.607.614,00	2.883.887.999,00
Akumulasi Penyusutan	148.427.373,64	154.672.646,36
Nilai Buku	1.620.180.240,36	2.729.215.352,64
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.383.881.915,00	2.023.670.850,00
Akumulasi Penyusutan	1.253.850.147,86	276.336.190,00
Nilai Buku	4.130.031.787,14	1.747.334.660,00
Aset Tetap Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0
Nilai Buku	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>8.732.864.768,00</b>	<b>6.306.601.178,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.597.479.418,88</b>	1.340.480.524,65
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>6.135.385.349,12</b>	<b>4.966.120.653,35</b>

Jumlah saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 setelah penyusutan adalah sebagai berikut:

		<b>Tahun 2019</b>			<b>Tahun 2018</b>
a. Tanah	Rp	145.725.000,00		Rp	145.725.000,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	239.448.341,62		Rp	343.845.640,71
c. Gedung dan Bangunan	Rp	1.620.180.240,36		Rp	2.729.215.352,64
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	4.130.031.767,14		Rp	1.747.334.660,00
e. Aset Tetap Lainnya	Rp	0		Rp	0
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0		Rp	0
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>6.135.385.349,12</b>		Rp	<b>4.966.120.653,35</b>

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>b.1. Tanah</b>	<b>Rp. 145.725.000,00</b>	<b>Rp. 145.725.000,00</b>

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2018	Saldo Koreksi TA 2019	Penambahan TA 2019	Pengurangan TA 2019	Saldo per 31 Des 2019
Tanah	145.725.000,00	-	-	-	145.725.000,00
<b>Jumlah</b>	145.725.000,00	-	-	-	145.725.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018. Pada Tahun Anggaran 2019 saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 145.725.000,00 dan tidak terdapat penambahan tanah.

Maka Saldo per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 145.725.000,00

	<b>Tahun 2019</b>	<b>2018</b>
<b>b.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp. 1.434.650.239,00</b>	<b>Rp. 1.253.317.329,00</b>

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2018	Penambahan TA 2019	Pengurangan TA 2019	Nilai Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Des 2019
Peralatan dan Mesin						
- Alat Berat						
- Alat Angkutan	766.398.888,00	151.750.000,00		918.148.888,00	823.014.578,83	95.134.309,17
- Alat Bengkel & Ukur	26.091.800,00			26.091.800,00	15.655.080,00	10.436.720,00
- Alat Pertanian						
- Alat Kantor & RT	427.274.091,00	29.582.910,00		456.857.001,00	334.826.008,55	122.030.992,45
- Alat Studio	33.552.550,00			33.552.550,00	21.706.230,00	11.846.320,00
- Alat Kedokteran						
- Alat Laboratorium						
- Alat Keamanan						
<b>Jumlah</b>	<b>1.253.317.329,00</b>	<b>181.332.910,00</b>		<b>1.434.650.239,00</b>	<b>1.195.201.897,38</b>	<b>239.448.341,62</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 181.332.910,00 pengurangan sebesar Rp. 0,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.195.201.897,38

Perincian penambahan alat kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Harga Satuan	Total
1	Faximail	1	8.118.000,00	8.118.000,00
2	Set soundsystem Baretone	1	3.179.000,00	3.179.000,00
3	Laptop Asuz	2	9.142.955,00	18.285.910,00
16	Drone			
	<b>JUMLAH</b>			<b>29.582.910,00</b>

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>b.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp 1.768.607.614,00</b>	<b>Rp 2.883.887.999,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo sebelum penyusutan per 31 Desember 2019. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 10.139.040,- pengurangan sebesar Rp 1.125.419.425,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 148.427.373,64 sehingga saldo per 31 Desember 2019 setelah penyusutan sebesar Rp 1.620.180.240,36 Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2018	Penambahan TA.2019	Pengurangan TA.2019	Nilai Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Des 2019
Bangunan Gedung	2.883.887.999,00	10.139.040,00	1.125.419.425,00	1.768.607.614,00	148.427.373,64	1.620.180.240,36
Bangunan Monumen						
<b>Jumlah</b>	<b>2.883.887.999,00</b>	<b>10.139.040,00</b>	<b>1.125.419.425,00</b>	<b>1.768.607.614,00</b>	<b>148.427.373,64</b>	<b>1.620.180.240,36</b>

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>b.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp 5.383.881.915,00</b>	<b>Rp 2.023.670.850,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo di neraca per 31 Desember 2019. Aset ini terdiri dari Jalan dan jembatan, dan Bangunan air irigasi. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penambahan Aset dari Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp 3.360.211.065,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.253.850.147,86 sehingga saldo per 31 Desember 2019 setelah penyusutan sebesar Rp 4.130.031.767,14. Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2018	Penambahan TA.2019	Pengurangan TA.2019	Nilai Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Des 20179
Jalan dan Jembatan	478.638.450	1.642.218.181	0	2.120.856.631	611.790.347,34	1.509.066.283,66
Bangunan Air	1.545.032.400	1.717.992.884	0	3.263.025.284	642.059.800,52	2.620.965.483,48

(irigasi)						
Instalasi	0	0	0	0	0	0
Jaringan	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	2.023.670.850	3.360.211.065	0	5.383.881.915	1.253.850.147,86	4.130.031.767,14

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>b.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018. Aset ini terdiri dari Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan , Hewan/ Ternak dan Tumbuhan. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penambahan Aset sebesar Rp,00 dan pengurangan sebesar Rp 0,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.,00. Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2018	Penambahan TA.2019	Pengurangan TA.2019	Saldo per 31 Des 2019
Buku dan Kepustakaan	-	-	-	-
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>b.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp 0 ,00</b>	<b>Rp 0 ,00</b>

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>c. Aset Lainnya</b>	<b>Rp 10.133.750,00</b>	<b>Rp 20.267.500,00</b>

Pada awal Tahun 2019 nilai aset lainnya berupa aset tak berwujud sebesar Rp., 40.535.000,00, Akumulasi penyusutan Rp. 30.401.250,- sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.133.750,00.

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>c.1. Tagihan Piutang Angsuran</b>	<b>Rp 0 ,00</b>	<b>Rp 0 ,00</b>

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>c.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Rp 0 ,00</b>	<b>Rp 0 ,00</b>

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>c.3. Aset tak Berwujud</b>	<b>Rp 40.535.000,00</b>	<b>Rp 40.535.000,00</b>

Pada tahun 2019 Aset tidak berwujud tidak mengalami penambahan sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 40.535.000,00

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>c.3. Aset Lain-lain</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

#### 5.1.4 Kewajiban

##### d. Kewajiban Jangka Pendek

	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
<b>d.1. Hutang kepada Pihak Ketiga</b>	<b>Rp 0 ,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo pajak-pajak yang belum dibayar pada tahun anggaran 2019 dan baru dibayarkan pada tahun 2020. Dengan perincian sebagai berikut :

<b>Jenis pajak</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah</b>
PPh 21	0	
PPh 23	0	
PPN	0	
PPh 22	0	<b>0</b>

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>d.2. Hutang beban</b>	<u>Rp 2.539.496 ,00</u>	<u>Rp 2.200.834,00</u>

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>d.3. Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>	<u>Rp 0 ,00</u>	<u>Rp 0 ,00</u>

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga atau pegawai yang belum selesai dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

#### 5.1.5. Ekuitas

	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>a. Ekuitas</b>	<u>Rp. 6.145.125.276,12</u>	<u>Rp. 4.990.025.334,35</u>

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD.

## 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Untuk pengakuan pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan menggunakan Basis Kas, yaitu bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan atau dicatat pada saat uang diterima atau dibayarkan. Untuk pengakuan aset kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan Basis Akrual. Basis Akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian.

Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih

dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran.

## **BAB VI**

### **Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang, yang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang membantu Bupati Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **BAB VII**

### **Penutup**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 .

Kota Mungkid, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGELANG



**PARDI SRIONO, SH**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19600501 1986031 020